



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan dari misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Rencana Strategis ini berupa serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk di implementasikan dalam program/kegiatan guna pencapaian visi dan misi. Dalam sistem akuntabilitas perencanaan strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

II.1. Visi dan Misi

II.1.1. Visi

II.1.2. Misi

Tabel 2. Visi dan Misi Gubernur Sumatera Selatan									
RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026					RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029				
Visi	Misi		Tujuan	Sasaran	Visi	Misi		Tujuan	Sasaran
Sumsel Maju Terus Untuk Semua	1	Menjadikan Sumatera Selatan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Regional.		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kualitas	Sumsel Maju Terus Untuk Semua	1	Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan keterampilan, dan pengetahuan, kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kualitas	1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan SDM 2. Meningkatkan derajat kesehatan. 3. Meningkatkan pembangunna sektor kepemudaan. 4. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak.
	2	Meningkatan Pemanfaatan potensi sumber daya alam guna penyediaan sumber energy dan pangan yang berkualitas.		Penataan Peraturan Perundang-undangan.		2	Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Meningkatnya daya saing dan ketahanan ekonomi daerah.	1. Meningkatkan pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan daerah. 2.Meningkatnya investasi dan perdagangan daerah. 3. Terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah
	3	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas.		Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas. dan		3	Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.	Terwujudnya keterkaitan ketahanan pangan, energi dan kedaulatan air.	1. Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air. 2.Meningkatnya Pengembangan Hilirisasi Berbasis Sektor Unggulan (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan).
	4	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas.		Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas.		4	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan	Meningkatnya pengelolaan lingkungan	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang Berkualitas
	5	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Pelayanan Publik yang Tata Kelola yang Baik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembinaan		5	Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.	Meningkatnya kualitas dan konektivitas daerah	1 Meningkatkan Akses Air Minum dan Sanitasi 2. Meningkatkan Akses Hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
				Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan.		6.	Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.	Meningkatnya kualitas dasar infrastruktur masyarakat.	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana
				Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah.		7.	Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang mejujung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.	Meningkatnya pengelolaan bencana	Meningkatnya upaya penanggulangan bencana
				Meningkatnya Koordinasi Bidang-bidang Perekonomian.				Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.	1 Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha. 2. Meningkatkan upaya perlindungan sosial
				Mewujudkan Kestabilan, Keamanan, Ketertiban dan Beragama yang Berkualitas.				Terwujudnya tata kelola pemerintahan	1. Meningkatkan kualitas birokrasi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
				Berkembangnya Tata Pemerintahan Baik.				Terwujudnya stabilitas sosial.	1. Menguatkan ketenteraman dimasyarakat. 2. Meningkatkan pembangunan kebudayaan

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Setelah APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan turunan dari RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Adapun dokumen Perjanjian Kinerja dapat diuraikan pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH BERDASARKAN RPD PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE TAHUN 2025

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target Tahun 2025	SKPD Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan	- Indeks Reformasi Birokrasi	1.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.1.1	Nilai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai	Sedang (3)	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			1.2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.2.1	Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM	%	100	Biro Hukum dan Ham
			1.3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas	1.3.1	Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan)	%	12.00	Biro Organisasi
					1.3.2	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dicapai	%	90	Biro Humas dan Protokol
			1.4	Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas	1.4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88.31	Biro Organisasi
			1.5	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah	1.5.1	Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan Sesuai Rencana dan Target	%	90	Biro Administrasi Pembangunan
			1.6	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	1.6.1	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	%	79	Biro Barang dan Jasa

			1.7	Meningkatnya Koordinasi perumusan Kebijakan umum Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	1.7.1	Jumlah Pemekaran Kecamatan yang difasilitasi	Kecamatan	2	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
					1.7.2	Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/Kota /Swasta/BUMN /BUMD dan Lembaga Non Pemerintah	MoU	20	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			1.8	Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian	1.8.1	Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang tersedia	%	90	Biro Perekonomian
					1.8.2	Persentase BUMD yang memberikan Kontribusi kepada PAD	%	90	Biro Perekonomian
			1.9	Mewujudkan kestabilan, keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas	1.9.1	Meningkatnya Peringkat MTQ	%	90	Biro Kesejahteraan Rakyat
					1.9.2	Persentase Fasilitas Pembinaan Mental, Spiritual, Pelayanan dan Pelayanan Non Pelayanan Dasar yang Ditindaklanjuti	%	90	Biro Kesejahteraan Rakyat
			1.10	Berekembangnya Tata Kepemerintahan yang Baik	1.10.1	Jumlah PD yang Mengimplementasikan Struktur Organisasi yang Sesuai Ketentuan Peraturan	PD	3	Biro Organisasi
					1.10.2	Persentase Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	%	80	Biro Organisasi
					1.10.3	Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi Sumatera Selatan	%	70	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
					1.10.4	Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Optimal	%	100	Biro Umum dan Perlengkapan

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
DARI RPJMD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029
PERIODE TAHUN 2025**

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target Tahun 2025	SKPD Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan	- Indeks Reformasi Birokrasi	1.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.1.1	Nilai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai	Sedang (3)	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			1.2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.2.1	Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM	%	100	Biro Hukum dan Ham
			1.3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas	1.3.1	Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan)	%	12.00	Biro Organisasi
					1.3.2	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dicapai	%	90	Biro Humas dan Protokol
			1.4	Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas	1.4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88.31	Biro Organisasi
			1.5	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah	1.5.1	Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan Sesuai Rencana dan Target	%	90	Biro Administrasi Pembangunan
			1.6	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	1.6.1	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	%	79	Biro Barang dan Jasa

			1.7	Meningkatnya Koordinasi perumusan Kebijakan umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	1.7.1	Jumlah Pemekaran Kecamatan yang difasilitasi	Kecamatan	2	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
					1.7.2	Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMD dan Lembaga Non Pemerintah	MoU	20	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			1.8	Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian	1.8.1	Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang tersedia	%	90	Biro Perekonomian
					1.8.2	Persentase BUMD yang memberikan Kontribusi kepada PAD	%	90	Biro Perekonomian
			1.9	Mewujudkan kestabilan, keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas	1.9.1	Meningkatnya Peringkat MTQ	%	90	Biro Kesejahteraan Rakyat
					1.9.2	Persentase Fasilitas Pembinaan Mental, Spiritual, Pelayanan dan Pelayanan Non Pelayanan Dasar yang Ditindaklanjuti	%	90	Biro Kesejahteraan Rakyat
			1.10	Berekembangnya Tata Kepemerintahan yang Baik	1.10.1	Jumlah PD yang Mengimplementasikan Struktur Organisasi yang Sesuai Ketentuan Peraturan	PD	3	Biro Organisasi

					1.10.2	Persentase Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	%	80	Biro Organisasi
					1.10.3	Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi Sumatera Selatan	%	70	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
					1.10.4	Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Optimal	%	100	Biro Umum dan Perlengkapan